

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH
PERBATASAN INDONESIA-VIETNAM TAHUN (2010-2014)**

Nurul Atika*

Email : nurulatika29ww@gmail.com

Pembimbing

Afrizal, S.IP, MA

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Panam

Pekanbaru. 28293

Telp / fax : 0761 - 63277

Abstract

This research that the study of diplomacy and strategy analyzes about Indonesian government's efforts in maintaining the border region Indonesia-Vietnam years (2010-2014). The purpose of this research is to explain about general conditions Indonesia-Vietnam defence, the condition of Indonesia-Vietnam border region, and Indonesian government's efforts in maintaining the border region Indonesia-Vietnam years (2010-2014).

Indonesia-Vietnam border lies between the Sekatung island and Condore island in South China Sea. Indonesian government attempted to keep the border region because Sekatung Island is one of the outer islands are disturbed to conflict. Moreover Indonesia has border issues with Vietnam. The problems that Indonesia has not been completed entire sea border agreement with Vietnam and the violation of the territorial sovereignty (illegal fishing) which is rife in the waters of Natuna Islands. That problems in Indonesia-Vietnam border, it will threaten the national security and defense Indonesia.

This research used qualitative methods which is done by explaining the case based on existing facts. The techniques used to collects data to study the case to library research in the form of journals, books, official documen, article, and website. The theoretical framework applied in this research are realism perspective, security concept, nation-state analysis and national security theory. National security is a form of a country's ability to provide a protection for each country from external threats indication. The persective used

Keyword: *effort, national security, defence, boundary, the continental shelf boundary, exclusive economic zone*

Pendahuluan

Pertahanan merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bagi sebuah bangsa dan negara. Pertahanan sebuah negara bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan negara. Usaha pertahanan negara dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika perkembangan lingkungan strategis yang di hadapi. Upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional, namun juga pada isu non-tradisional seperti setiap aksi yang mengancam kedaulatan, keutuhan, serta kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan letak geografisnya, Indonesia memiliki perbatasan dengan 3 negara di wilayah darat, dan dengan sepuluh negara di wilayah laut. Adapun negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia antara lain: Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan untuk wilayah Laut Indonesia berbatasan dengan negara Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, PNG, Palau dan Timor Leste.¹

Salah satu negara yang wilayah perairannya berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Vietnam. Kedua negara ini memiliki perbatasan langsung di Laut Cina Selatan tepatnya di Kabupaten Natuna. Indonesia memiliki tiga pulau terluar yang berhadapan langsung dengan Vietnam antara lain:

pulau Sebetul, pulau Sekatung dan pulau Senoa. Pulau Sekatung ini merupakan pulau paling terluar di Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan Pulau Condore milik Vietnam. Di pulau ini terdapat TD 030 yang menjadi titik dasar dalam pengukuran dan penetapan batas negara Indonesia dengan Vietnam. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau-pulau ini batas negara kita di tentukan.

Indonesia harus berupaya menjaga wilayah perbatasan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis bagi Indonesia dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Keberhasilan dalam pembangunan ini merupakan representative dari nilai kedaulatan sebuah negara. Berawal dari kawasan perbatasan maka akan mendorong perkembangan ekonomi, sosial budaya dan kegiatan masyarakat lainnya yang akan saling mempengaruhi antara negara, sehingga berdampak pada strategi keamanan dan pertahanan negara.

Menurut Panglima TNI Jendral TNI Djoko Santoso secara tegas menyatakan bahwa pulau Sekatung merupakan salah satu dari 12 pulau terluar Indonesia yang memiliki potensi konflik dengan negara lain.²

Antara Indonesia dan Vietnam pernah terjadi sengketa mengenai batas landas kontinen. Sengketa perbatasan laut ini memerlukan perhatian yang serius

¹ Irmanirawan "Pentingnya kawasan perbatasan bagi kedaulatan bangsa", 2014. Diunduh dari <http://perbatasan-dev.unmul.ac.id/?p=4&a=&b=12> pada tanggal 06 Oktober 2016

² Arsip Nasional Republik Indonesia "beranda depan negara dalam bingkai NKRI", Edisi 56 th 2011/EDISI KHUSUS. Diunduh dari <http://www.anri.go.id/assets/collections/files/mkn-56-for-web568c89e02ab4a.pdf> pada tanggal 08 Oktober 2016

bagi pemerintah. Kekalahan dalam sengketa perbatasan laut mempunyai dampak yang luas antara lain: martabat negara menurun, kerugian di bidang ekonomi, timbul masalah keamanan perbatasan dan rakyat sangat mungkin tidak terkendali, sehingga dapat menjadi krisis pemerintahan.

Selain itu, Indonesia juga memiliki Permasalahan batas ZEE yang belum tuntas dengan Vietnam. Batas negara ZEE ini harus segera di tuntaskan, karena jika batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam sudah jelas, maka akan dengan mudah negara Indonesia memelihara dan mempertahankan batas wilayah negara. Selain itu Indonesia juga dapat mengelola wilayah perbatasan demi kepentingan nasional , serta melakukan tindakan hukum yang tegas bagi pelaku pelanggaran wilayah kedaulatan.

Selain adanya permasalahan batas-batas negara dengan Vietnam, di perbatasan kedua negara ini juga terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan salah satunya yaitu kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan dari Vietnam.

Pada tahun 2010, 50 % kasus *illegal fishing* yang ada di Indonesia banyak terjadi di perairan Natuna, Kepri. Dirjen Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan hingga September 2010, DKP sudah menangani 150 kasus *illegal fishing* di Natuna.³ Dari Data Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga akhir agustus 2013 telah menangkap 17 kapal asing dari Vietnam di perairan Natuna.⁴ Perkara tindak pidana perikanan yang disidik oleh PPNS perikanan data ekspose sampai dengan 28 november 2014 terdapat 7 kapal asing asal Vietnam di satuan kerja PSDKP Natuna yang diduga melakukan tindakan *illegal fishing* diwilayah perairan Laut Natuna.⁵

Dari data tersebut terlihat bahwa di perbatasan Indonesia-Vietnam tepatnya di perairan Natuna merupakan wilayah yang rawan terjadinya *illegal fishing*, sehingga memerlukan penanganan khusus. *Illegal Fishing* menjadi sebuah masalah penting bagi pertahanan negara, hal ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014 bidang pertahanan dan keamaan yang dalam agendanya memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.

Adanya permasalahan batas wilayah antara Indonesia dengan Vietnam menyebabkan maraknya aksi ancaman pelanggaran wilayah kedaulatan (*illegal fishing*) di perairan Natuna. Permasalahan perbatasan ini dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan, warga negara atau penduduk negara, serta wilayah negara Indonesia. Hal ini menuntut agar pemerintah Indonesia memiliki penanganan yang khusus dalam menangani masalah ini. Bagi Indonesia, ancaman keamanan

³ Puji Lestari, "Motivasi Indonesia Bekerjasama Dengan Vietnam dibidang perikanan tahun 2010-2012", JOM FISIP Volume 1 No.3-Februari 2016. Diunduh dari <http://download.portal.garuda.org/article.php?article=185914&title=MOTIVASI%20INDONESIA%20BEKERJASAMA%20DENGAN%20VIETNAM%20DI%20BIDANG%20PERIKANAN%20TAHUN%202010-2012> pada tanggal 09 Oktober 2016.

⁴ KKP Tangkap 58 Kapal Illegal Fishing. Diunduh dari http://djpdskp.kkp.go.id/2014/arsip/c/31/KKP-TANGKAP-58-KAPAL-ILLEGAL-FISHING/?category_id=20 pada tanggal 10 Oktober 2016

⁵ Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id> pada tanggal 10 Oktober 2016

diwilayah perbatasan dengan Vietnam sangat merugikan Indonesia, sehingga menjadi prioritas untuk di tangani, termasuk bekerjasama dalam bidang pertahanan dan segera menyelesaikan batas-batas negara dengan Vietnam.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma realis yang menjadikan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Maksudnya adalah bahwa dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu menentukan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Tingkat dan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara-bangsa (*nation-state*). Tingkat analisa ini lebih fokus pada apa yang dilakukan oleh negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional (*national interest*).

Teori yang relevan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah teori Teori Keamanan Nasional. Keamanan dapat dipahami dari sisi nasional, internasional, global, ataupun manusia. Keamanan menempatkan bangsa sebagai objek dari keamanan nasional.⁶ Keamanan nasional

merupakan bentuk dari kemampuan suatu negara untuk memberikan suatu bentuk perlindungan bagi setiap negaranya dari indikasi ancaman dari luar. Sebuah fenomena yang dapat membahayakan kinerja dari keamanan nasional itu sendiri. Ancaman bisa selalu datang kapan saja dalam fenomena internasional dan hal itu adalah wajar dalam gejala internasional. Suatu negara dapat membuat kebijakan bagi keamanan nasionalnya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kekuatan militer, membentuk aliansi serta membuat strategi-strategi lainnya yang bertujuan untuk melindungi negaranya dari ancaman yang datang dari luar.

Hasil dan Pembahasan

Setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya, hal ini di karenakan kondisi pertahanan dan keamanan yang stabil akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu negara. Pertahanan dan keamanan perbatasan merupakan salah satu aspek terpenting bagi Indonesia. Perbatasan memiliki arti penting tidak saja dalam konteks wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah, juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dari aspek pertahanan dan keamanan. Wilayah perbatasan perlu dijaga eksistensinya bagi Indonesia, karena keindahan, kekayaan dan keuntungan menjadi batas negara, sehingga segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara dalam pemanfaatan sumber daya, kekuatan pertahanan dan keamanan yang diperlukan, serta bagaimana sumber daya dan kekuatan itu di kelola untuk keperluan pengelolaan dan

⁶ Buzan, Barry *“People, State, And Fear : A Agenda For International Security Studies In The Post Cold War 2nd edition”*, London : Hasvester Whatsheaf, 1991.

pertahanan wilayah perbatasan akan berdampak bagi terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman. Bahkan tidak mungkin, dengan tidak terjaganya eksistensi wilayah perbatasan itu justru akan menjadi ancaman tersendiri bagi negara Indonesia kita yang kaya akan sumber daya.

Jika di lihat dari geografisnya, Indonesia dan Vietnam merupakan kedua negara yang terletak di Asia Tenggara dan memiliki perbatasan laut secara langsung di Laut Cina Selatan. Untuk itu pemerintah Indonesia dan Vietnam harus membina hubungan bilateral dengan baik dan meningkatkan berbagai kerjasama, serta menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di kawasan perbatasan kedua negara secara damai, sehingga kondisi keamanan regional akan menjadi lebih baik lagi.

Isu mengenai perbatasan Indonesia-Vietnam menjadi hal yang sangat penting untuk di perhatikan, karena apabila batas antar negara belum jelas, maka akan menimbulkan konflik perbatasan yang dapat memicu ketegangan kedua negara yang dapat mengarah kepada penggunaan kekuatan militer. Kedaulatan dan penguasaan daerah perbatasan harus selalu kita jaga. Lepasnya daerah perbatasan akan membawa akibat terhadap batas negara dan berkurangnya luas wilayah. Daerah perbatasan tersebut sangat perlu untuk diamankan, karena memiliki potensi sumber daya alam yang dapat memenuhi kepentingan dalam negeri bagi terciptanya kemakmuran masyarakat. Untuk menangkal di perlukan sebuah kebijakan pengelolaan pertahanan

dan keamanan nasional untuk wilayah perbatasan yang difokuskan pada negara itu sendiri, serta melakukan kebijakan kearah keluar negeri dengan melakukan kerjasama dengan negara vietnam. Adapun upaya pemerintah dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Vietnam tahun (2010-2014) antara lain:

Upaya Internal

1. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Implementasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai amanat pembangunan RPJPN 2005-2025 tersebut telah dimulai sejak RPJMN I (2004-2009), namun demikian belum menampakkan hasil yang signifikan. Untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, RPJMN II (2010-2014) menempatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai prioritas nasional.⁷

⁷ Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Tahun 2010-2014. Diunduh dari http://bnpp.go.id/document/produk_hukum/2015/perbatasan/Peraturan_BNPP_Nomor_1_Tahun_2015.pdf pada tanggal 02 Januari 2017

2. Kebijakan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan yang tertinggal harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan. Sebagaimana telah tercantum dalam GBHN 1999 yang di jabarkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 yang memuat program-program prioritas selama lima tahun.⁸

3. Membangun Pos Lintas Batas

Pembangunan pos lintas batas sangat penting mendapatkan prioritas berhubung Indonesia dengan wilayah yang sangat luas ini berbatasan langsung dengan beberapa negara baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Pembangunan pos lintas batas di area strategis bertujuan untuk menjadikan kawasan perbatasan semakin maju dan tidak terasing, serta dapat memberikan manfaat ekonomis yang semakin besar. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan akan semakin meningkat. Adapun pos lintas batas yang berada di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

N o	Kecam atan	Pos Lintas Batas	Klasifikasi/Ti pologi Pos Lintas Batas
1	Serasa n	Serasa n	Tradisional/L aut
2	Siantan	Tarem pa	Tradisional/L aut
3	Bungur an	Sedana u	Tradisional/L aut
4	Bungur an	Sedana u	Tradisional/L aut

⁸ Pembangunan perbatasan. Diunduh dari <http://www.bappenas.go.id> pada tanggal 04 Januari 2017

	Timur		
5	Bungur an Timur	Sekun yam	Tradisional/L aut
6	Midai	Midai	Tradisional/L aut
7	Tambel an	Tembe lan	Tradisional/L aut
8	Jemaja	Letung	Tradisional/L aut

4. Penguatan TNI di wilayah Perbatasan

Keutuhan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan suatu keharusan untuk setiap warga Negara Indonesia, maka keamanan dan stabilitas negara ini harus benar-benar di jaga. Selain kewajiban warga Negara Indonesia yang paling berperan disini adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) jika terjadi sesuatu dalam gangguan keamanan nasional Negara ini maka TNI yang berada di garis depan untuk mengamankannya.

Hingga tahun 2012 TNI-AL mengoperasikan satu unit kapal perang untuk mencegah dan menangkap nelayan asing yang mencuri ikan di Natuna. Di kabupaten Natuna juga terdapat Komando Distrik Militer 0318/Natuna dan Batalyon Infanteri 134/TS serta menempatkan 2 Kompi Senapan yang berjumlah 200 orang. Selain itu juga di bangun Pangkalan TNI-AU di ranai.

5. Membangun Pos Pengawasan

Salah satu hal yang menunjang bagi kemampuan jangkauan untuk melaksanakan patroli dan pengawasan di wilayah perbatasan adalah dengan membangun pos pengawasan. Sementara itu, untuk bidang

pertahanan dan keamanan, saat ini Pulau Laut sudah memiliki Pos TNI AL dan Pos Pengamanan Daerah Terluar di Sekatung. Personil yang ditempatkan di Sekatung ini lebih besar dari yang di Pulau Laut, mengingat strategisnya Sekatung sebagai titik terdepan Indonesia. Sebenarnya, sejak tahun 1985, sudah ada pos marinir di Desa Air Payang. Personil TNI yang ditempatkan di kawasan ini meliputi TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Juga sudah ada Koramil, dan Babinsa di tiga desa yang ada di Pulau Laut. Selain itu, terbangun dua mercusuar dan tiga rambu suar di kawasan ini. Salah satu mercusuar itu ditempatkan di Sekatung.⁹

Sementara lainnya di Pulau Semiun, para petugas Distrik Navigasi itu ditempatkan di sebuah rumah beton dengan tipe barak. Selain petugas navigasi, sejumlah personil TNI juga ditempatkan untuk menjaga pulau yang menjadi satu dari 12 pulau terdepan yang rawan infiltrasi asing itu. Pos jaga TNI sendiri berada di puncak bukit, langsung menghadap Laut Cina Selatan.

6. Patroli Pengawasan

a. Patroli TNI –AL

Untuk mengantisipasi masuknya kapal asing ke perairan Natuna, Komandan TNI-AL terus meningkatkan patroli di perbatasan Indonesia-Vietnam. Dalam menjaga wilayah perbatasan ini, prajurit

TNI-AL dengan alutsistanya menggunakan strategi dengan berada dalam titik pertahanan (defence point) yang berbeda dan menyebar. Untuk melakukan penindakan terhadap kapal asing, kapal patroli TNI-AL perlu sampai berada di anjungan kapal negara lain atau ke tengah laut, karena alutsista yang dimiliki TNI AL selama ini sudah bisa menjangkau bahkan hingga jarak 400 kilometer. Kondisi pertahanan di Natuna dalam kondisi baik dan memadai, baik personilnya maupun alutsista yang ada di perbatasan. Salah satu kekuatan tempur laut di Armada Barat misalnya KRI Slamet Riyadi 352, jenis frigat yang bisa berfungsi sebagai perusak dan kapal patroli lain seperti KRI Kobra dan KRI Anakonda.¹⁰

b. Patroli Badan Koordinasi dan Keamanan Laut (BAKORKAMLA)

Bakorkamla ini mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi laut secara terpadu yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan hukum, pengamanan pelayaran serta pengamanan aktifitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan. Bakorkamla yang berada di wilayah Kepulauan Natuna ini melakukan patroli dan bekerjasama dengan instansi lintas sektoral lainnya termasuk PDSKP, dan TNI-AL serta masyarakat.¹¹

⁹ Ahmad Nurmandi, Trisno Adi Putra, Nikolas Panama “ *Menjaga Indonesia dari KEPRI , Peluang, Tantangan, & Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau*”, Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, 2012. Diunduh dari <http://pascasarjana.ums.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/menjaga-indonesia-dari-kepri-.pdf> pada tanggal 16 Desember 2016

¹⁰ Kapal Asing Vietnam di Natuna. Diunduh dari <http://www.tempo.co.id> pada tanggal 05 Januari 2017.

¹¹ Tugas dan Fungsi Bakorkamla. Diunduh dari <http://bakorkamla.go.id/index.php/profil/>

Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasi laut, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) membangun Stasiun Regional Coordinating Center (RCC) di Bukit Senubing, Ranai Kabupaten Natuna Provinsi Kepri. Stasiun tersebut berfungsi untuk memantau dan merekam seluruh kapal yang melintas di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga jika ada kapal asing yang masuk wilayah RI segera terdeteksi.¹² Stasiun RCC ini bisa memantau sejauh 100 mil lebih dan mendeteksi kapal yang memiliki berat 300 GT, sehingga berguna memantau semua aktifitas pelayaran di ALKI.

c. Patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DIRJEN PSDKP)

Untuk meningkatkan kinerja lembaga PSDKP ini memiliki 27 kapal patroli unit yang tersebar diseluruh WPP-NRI. Pada tahun 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah 4 (empat) armada Kapal Pengawas (KP) di Kabupaten Natuna, kapal tersebut antara lain: yakni KP Hiu 012, KP Hiu 013, KP Hiu 014, dan KP Hiu 015 guna memperkuat pemberantasan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).¹³

tugas- fungsi pada tanggal 20 Desember 2016

¹² Bakorkamla Bangun Stasiun Pemantau di Natuna. Diunduh dari <http://nasional.sindonews.com/read/686487/14/pengamana-n-di-laut-natuna-perlu-ditingkatkan1352307880> pada tanggal 20 Desember 2016

¹³ Empat Kapal Pengawas Hiu Perkuat Pemberantasan Illegal Fishing. Diunduh dari <http://djpsdkp.kkp.go.id/2014/arsip/c/268/E>

Kapal-kapal pengawas perikanan tersebut telah dilengkapi dengan teknologi vessel monitoring system (VMS). Dengan sistem ini dapat menjangkau keberadaan dan aktivitas kapal secara luas dan dapat terpantau setiap saat.¹⁴

d. Patroli Polair

Tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dalam melanjutkan tugas pokok Polisi Perairan tersebut selaku pimpinan yang baru selalu mengoptimalkan tugas-tugas dengan menggunakan alat yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 56 unit kapal patroli polisi.¹⁵

Upaya Eksternal

1. Penyelesaian Batas Landas Kontinen dengan Vietnam

Penyelesaian batas laut RI-Vietnam memakan waktu selama 25 tahun di mulai pada tahun 1978 dan berakhir pada tahun 2003 dilakukan sebanyak 12 kali putaran perundingan formal, 20 kali konsultasi informal. Perundingan terakhir yaitu ketika Indonesia menjadi tuan rumah dalam *Formal Meeting on the Delimitation of*

MPAT-KAPAL-PENGAWAS-HIUPERKU AT-PEMBERANTASASAN-ILLEGAL FISHING/ pada tanggal 21 Desember 2016

¹⁴ KKP Tangkap 58 Kapal Illegal Fishing. Diunduh dari http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/31/KKP-TANGKAP-58-KAPAL-ILLEGAL-FISHING/?category_id=22 pada tanggal 21 Desember 2016

¹⁵ Tugas Pokok, Visi dan Misi. Diunduh dari http://polair.polri.go.id/?page_id=13 pada tanggal 21 Desember 2016

Continental Shelf Boundaries between Indonesia and Vietnam, tanggal 5-7 Juni 2003 di Denpasar-Bali, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary*, pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi. Penandatanganan ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno putri, dan Presiden Republik Sosialis Vietnam, Tran Duc Luong. Adanya kesepakatan tentang landas kontinen ini menjadi langkah awal bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan Vietnam. Untuk menindaklanjuti perjanjian batas landas kontinen tersebut, Indonesia telah meratifikasi dengan UU No.18 Tahun 2007.

2. Perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dengan negara Vietnam untuk membentuk kerjasama bilateral dalam bidang perbatasan. Kedua negara bersepakat untuk melakukan perundingan terkait masalah batas Zona Ekonomi Eksklusif..

Dari tahun 2010-2014, Indonesia telah melakukan pertemuan sebanyak kali dengan Vietnam guna melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain:

1. Pada tanggal 11–12 Februari 2010 telah dilaksanakan

pertemuan penjjakan yang bersifat informal di Hanoi.Selanjutnya pada tanggal 17-18 Mei 2010 telah dilaksanakan perundingan putaran pertama Batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam di Hanoi.¹⁶

2. Putaran kedua perundingan penetapan ZEE telah diadakan pada tanggal 21-24 Oktober 2010 di Bali. Pada bulan Mei dan Oktober 2010, keduaneagra telah melanjutkan perundingan batas ZEE. Pada pertemuan tersebut Indonesia telah menyampaikan argumentasi hukum mengenai perlunya bagi kedua negara untuk melakukan penetapan batas ZEE di antara kedua negara berdasarkan Hukum Internasional, khususnya UNCLOS 1982.¹⁷
3. Putaran ketiga perundingan penetapan ZEE Indonesia-Vietnam di selenggarakan pada tanggal 25-28 Juli 2011 di Hanoi, Vietnam.¹⁸
4. Putaran keempat perundingan penetapan ZEE Indonesia-Vietnam selenggarakan pada tanggal 3-5 Juli 2012 di Yogyakarta.¹⁹
5. Putaran kelima perundingan penetapan ZEE Indonesia-Vietnam selenggarakan pada tanggal Pertemuan Teknis ke-5 telah dilaksanakan di

¹⁶ Perbatasan RI-Vietnam. Diunduh dari <http://strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf> pada tanggal 06 Januari 2017

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Hanoi, Vietnam pada 30 Juli 2013.²⁰

Hingga putaran ke-5 ini kedua negara belum menemukan kesepakatan dalam penentuan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif. Upaya perundingan dalam mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI merupakan sesuatu yang tidak dapat di kompromikan. Untuk itu Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mempercepat penyelesaian batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Vietnam demi kepentingan nasional Indonesia.

3. Kerjasama Indonesia-Vietnam di Bidang Pertahanan

Menghadapi masalah di perbatasan, maka Indonesia dan Vietnam mengadakan Kerjasama di bidang Pertahanan melalui penandatanganan MoU atau nota kesepahaman yang telah di tandatangani pada tahun 2010. Kerjasama bilateral ini bertujuan untuk mendorong hubungan bilateral yang menuju ke hubungan kemitraan strategis demi kepentingan rakyat kedua negara dan demi terciptanya keamanan dan perdamaian di kawasan. Dengan adanya kerjasama ini, maka dapat mempercepat perundingan penetapan batas wilayah kedua negara, dan segera menuntaskan permasalahan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Vietnam.

Kerjasama di bidang pertahanan ini dilakukan dengan saling kunjung antar pejabat pertahanan dan militer guna membahas masalah pertahanan dan keamanan khususnya di perbatasan,

menyelesaikan batas-batas perbatasan, pertukaran delegasi militer, latihan bersama angkatan laut kedua negara.

Kerjasama ini semakin berkembang dengan di lakukannya latihan bersama, seperti latihan *multilateral naval exercise komodo* yang diselenggarakan di Batam, Kepulauan Anambas, dan perairan Natuna, pada Maret hingga April tahun 2014. Kegiatan ini di ikuti oleh 4.885 personel yang terdiri dari 3.000 personel TNI AL yang diperkuat TNI AD, TNI AU, dan Polri, serta 1.885 personel Angkatan Laut dari 17 negara-negara ASEAN dan negara-negara sahabat terlibat dalam latma yang berlangsung di Batam, Anambas, dan Laut Natuna, Kepulauan Riau.²¹

Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 mengangkat tema “ASEAN Navy: Cooperation for Stability”. Secara umum, Latma Komodo 2014 bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam bentuk kerja sama menangani bencana alam, sekaligus bertujuan untuk membangun kepercayaan bersama dalam rangka meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan maritim serta meningkatkan kemampuan komunikasi sosial internasional dan kerja sama prajurit TNI Angkatan Laut antar negara ASEAN dan non-ASEAN. Kegiatan ini juga sebagai bentuk diplomasi pertahanan antara Angkatan Laut negara-negara peserta. Dengan adanya latihan bersama ini, maka

²⁰ Presentasi Direktur Polkanwil Seminar Hukla Surabaya. Diunduh dari <http://fh.unair.ac.id> pada tanggal 06 Januari 2017

²¹ Dinas Penerangan Angkatan Laut “*Multilateral Naval Exercise Komodo 2014*”, Cakrawala Media Informasi Kemaritiman, Edisi 418, 2014. Diunduh dari <https://www.s3cn.joomag.com> pada tanggal 08 Januari 2017

akan menunjukkan kekuatan dan kesiapan serta memperkuat kesepahaman dan rasa kekeluargaan awak kapal perang untuk mewujudkan perdamaian serta menjaga stabilitas kawasan.

Latihan bersama ini tidak hanya di ikuti oleh Angkatan Laut Vietnam namun juga di ikuti oleh angkatan laut negara-negara ASEAN, plus negara-negara sahabat yang memiliki keterkaitan kuat pada stabilitas kawasan, yaitu Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Amerika Serikat, Cina, dan Rusia.²²

Simpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, mempunyai posisi yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga wilayah perbatasan menjadi rawan terjadinya berbagai masalah. Pemerintah perlu meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan Indonesia-Vietnam. Hal ini di karenakan wilayah perbatasan memiliki arti penting dalam keberhasilan pembangunan negara. Wilayah perbatasan ini akan mendorong perkembangan ekonomi, sosial budaya, dan kegiatan masyarakat lainnya yang akan berdampak pada strategi keamanan dan pertahanan negara. Selain itu pemerintah Indonesia perlu secepatnya menyelesaikan batas-batas wilayah dengan negara

Vietnam. Apabila batas-batas wilayah sudah jelas, maka akan dengan mudah pemerintah Indonesia mengelola sumber daya alam di wilayah perbatasan dan akan dengan mudah untuk memberantas pelaku pelanggaran wilayah kedaulatan dari Vietnam, sehingga akan meningkatkan pertahanan dan keamanan di perbatasan.

Daftar Pustaka

- Irmanirawan *"Pentingnya kawasan perbatasan bagi kedaulatan bangsa"*, 2014. Diunduh dari <http://perbatasandev.unmul.ac.id/?p=4&a=&b=12> pada tanggal 06 Oktober 2016
- Arsip Nasional Republik Indonesia *"beranda depan negara dalam bingkai NKRI"*, Edisi 56 th 2011/EDISI KHUSUS. Diunduh dari <http://www.anri.go.id/assets/collections/files/mkn-56-for-web568c89e02ab4a.pdf> pada tanggal 08 Oktober 2016
- Puji Lestari, *"Motivasi Indonesia Bekerjasama Dengan Vietnam dibidang perikanan tahun 2010-2012"*, JOM FISIP Volume 1 No.3-Februari 2016. Diunduh dari <http://download.portal.garuda.org/article.php?article=185914&titl==MOTIVASI%20INDONESIA%20BEKERJASAMA%20DENGAN%20VIETNAM%20DI%20BIDANG%20PERIKANAN%20TAHUN%202010-2012> pada tanggal 09 Oktober 2016.
- KKP Tangkap 58 Kapal Illegal fishing. Diunduh dari http://djpskp.kkp.go.id/2014/arsip/c/31/KKP-TANGKAP-58KAPAL-ILLEGALFISHING/?category_id=20FISHING/?category

²² Dinas Penerangan Angkatan Laut "Pendidikan TNI Angkatan Laut", Cakrawala Media Informasi Kemaritiman, Edisi 419, 2014. Diunduh dari <https://www.s3cn.joomag.com> pada tanggal 08 Januari 2017

- _id=20 pada tanggal 10 Oktober 2016
<http://etd.repository.ugm.ac.id>. Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2016
- Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Tahun 2010-2014. Diunduh dari http://pp.go.id//document/produk_hukum/2015/perbatasan/Peraturan_BNPP_Nomor_1_Tahunj_2015.pdf pada tanggal 02 Januari 2017
- Pembangunan perbatasan. Diunduh dari <http://www.bappenas.go.id> pada tanggal 04 Januari 2017
- Ahmad Nurmandi, Trisno Adi Putra, Nikolas Panama “*Menjaga Indonesia dari KEPRI, Peluang, Tantangan, & Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau*”, Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, 2012. Diunduh dari <http://pasca sarjana.umy.ac.id/wpcontent/uploads/2015/10/menjagaindonesia-dari-kepri-.pdf> pada tanggal 16 Desember 2016
- Kapal Asing Vietnam di Natuna Diunduh dari <http://www.tempo.co.id> pada tanggal 05 Januari 2017.
- Tugas dan Fungsi Bakorkamla. Diunduh dari <http://bakorkamla.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi> pada tanggal 20 Desember 2016
- Bakorkamla Bangun Stasiun Peman tau di Natuna. Diunduh dari <http://nasional.sindonews.com/read/686487/14/pengamanan-di-laut-natuna-perluditingkatkan-1352307880> pada tanggal 20 Desember 2016
- Empat Kapal Pengawas Hiu Perkuat Pemberantasan Illegal Fishing. Diunduh dari <http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/268/EMPAT-KAPAL-PENGAWAS-HIU-PERKUAT-PEMBERANTASASAN-ILLEGAL-FISHING/> pada tanggal 21 Desember 2016
- KKP Tangkap 58 Kapal Illegal Fishing. Diunduh dari http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/31/KKP-TANGKAP-58KAPAL-ILLEGAL-FISHING/?category_id=22 pada tanggal 21 Desember 2016
- Tugas Pokok, Visi dan Misi. Diunduh dari http://polair.polri.go.id/?page_id=13 pada tanggal 21 Desember 2016
- Dinas Penerangan Angkatan Laut “*Multilateral Naval Exercise Komodo 2014*”, Cakrawala Media Informasi Kemaritimian, Edisi 418, 2014. Diunduh dari <https://www.s3cn.joomag.com> pada tanggal 08 Januari 2017
- Dinas Penerangan Angkatan Laut “*Pendidikan TNI Angkatan Laut*”, Cakrawala Media Informasi Kemaritimian, Edisi 419, 2014. Diunduh dari <https://www.s3cn.joomag.com> pada tanggal 08 Januari 2017